



**Judul** : Setelah para guru divaksin corona, Pemda mulai uji coba buka sekolah  
**Tanggal** : Rabu, 24 Maret 2021  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

# Setelah Para Guru Divaksin Corona Pemda Mulai Uji Coba Buka Sekolah

SEKOLAH di beberapa daerah sudah mulai uji coba pembelajaran tatap muka (PTM). Uji coba ini merupakan persiapan PTM setelah pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bagi guru dan tenaga kependidikan.

Ada beberapa wilayah yang sudah melakukan uji coba PTM. Antara lain, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengizinkan 110 sekolah menggelar PTM dengan protokol kesehatan.

"Pembelajaran dimulai tiga rombongan belajar setiap sekolah, lalu terus ditambah

hingga 50 persen jumlah ruang kelas yang ada," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah di Bekasi, Senin lalu.

Menurut dia, PTM ini sebetulnya hanya persiapan. Pasalnya, pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi pilihan utama. Sehingga, PTM ini belum melibatkan semua sekolah.

PTM ini, lanjut Inayatullah, dibagi dalam tiga rombongan belajar (rombel) setiap satu sekolah. Satu rombel, hanya 18 murid. "Maka, yang bisa menggelar tatap muka hanya 54 murid," tandasnya.

Selain Bekasi, beberapa wilayah lain juga sudah melakukan uji coba PTM. Misalnya Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan Blitar (Jawa Timur).

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mendukung langkah beberapa Pemerintah Daerah yang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Menurutnya, PTM dengan protokol kesehatan (prokes), seharusnya sudah sejak lama dilakukan. "Bagus kalau demikian. Karena sejak Januari, sudah ada imbauan untuk membuka sekolah," ujar Dede Yusuf kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Meskipun begitu, politisi Partai Demokrat ini menegaskan, PTM harus tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan. Selain itu, penilaian dan izin dari Pemerintah Daerah menjadi hal yang utama. "Izin itu harus berdasarkan prokes yang tepat," tandasnya.

Langkah beberapa Pemerintah Daerah itu, mendapat respons beragam. Ada yang pro, seperti Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian. Yang kontra, antara lain Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono. Berikut wawancaranya.

# PANDU RIONO, Epidemiolog Universitas Indonesia

## Risikonya Masih Banyak Banget



### Risiko terhadap murid bagaimana?

Memang risiko anak terinfeksi itu kecil dibandingkan orang tua. Kalau anak sekolah itu tinggal sama orangtua atau kakek dan neneknya, atau bersama keluarga besar, dan orangtuanya itu belum divaksinasi, sebaiknya sekolah jangan dibuka dulu.

### Berbahaya buat lansia, ya...

Iya, karena anak bisa menularkan kepada orang lansia (lanjut usia) di rumahnya. Anak sekolahnya sih nggak apa-apa. Tetapi kalau dibiarkan, bisa-bisa anak sekolah itu akan kehilangan kakek neneknya. Mereka nggak melihat ke situ.

### Bukankah di sebagian daerah, guru sudah divak- sinasi?

Mereka hanya melihat gurunya sudah divaksinasi. Tetapi, anak murid dan orangtuanya belum divaksinasi. Kemudian, belum lagi mereka berkumpul. Nah, bisa nggak protokol kesehatan diterapkan dengan konsisten.

Yang juga penting adalah ventilasi ruang kelas. Kalau perlu, kelasnya itu di lapangan terbuka. Jangan pakai ruang kelas yang tertutup, apalagi pakai AC semua. Kalau mau di kelas, jendela dan pintu harus terbuka. Pakai saja kipas angin.

### Apa yang harus dilakukan peme- rintah saat ini?

Sekarang ini bukannya tatap muka, tapi membuat program, proses belajar mengajar pada era pandemi. Me-

### Apa tanggapan Anda tentang uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di beberapa daerah?

Aturannya memungkinkan nggak untuk dilakukan. Rasio murid dan kelasnya bisa nggak untuk PTM. Ventilasi kelas sudah terbuka atau belum. Risikonya masih banyak banget.

### Apa saja risikonya?

Tidak usah saya sebutkan. Biar mereka tanya kepada epidemiolog. Karena izin itu urusan pemerintah, maka pemerintah harus punya pedoman yang tegas. Sekolah kan di bawah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakannya itu harus memikirkan risiko apa saja yang terjadi.

“

**Sekarang ini  
bukannya tatap  
muka, tapi membuat  
program, proses  
belajar mengajar  
pada era pandemi.  
Metodenya bukan  
100 persen tatap  
muka, namun  
hybrid.**

todanya bukan 100 persen tatap muka, namun *hybrid*. Misalnya dalam lima hari sekolah, cukup satu atau dua hari tatap muka. Selebihnya, pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selama pandemi belum terkendali, jangan membuat tatap muka setiap hari.

### Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah, PTM sudah sangat mendesak dilakukan. Apa tang- gapan Anda?

Iya, bisa diterima. Namun, itu bukan satu-satunya yang harus dipikirkan. Kalau dari saya, kita bikin program hybrid saja. Tatap mukanya cukup seminggu sekali. Selama beberapa bulan, itu kita lakukan.

Nanti kita evaluasi. Setelah itu, bisa dinaikkan jadi dua kali seminggu. Dievaluasi lagi. Tapi, kecil kemungkinan untuk PTM lebih dari satu kali seminggu. Karena, pandemi belum terkendali. Kalau sudah terkendali, mungkin bisa bertambah harinya. ■ NNM

**HETIFAH SJAIFUDIAN,**  
Wakil Ketua Komisi X DPR

# Pembelajaran Jarak Jauh Banyak Dampak Negatifnya

“

**Karena selama setahun, banyak dampak negatif PJJ (pembelajaran jarak jauh). Antara lain, learning loss, ancaman putus sekolah, dan tekanan psikologis.**

**Beberapa daerah sudah uji coba PTM. Apa tanggapan Anda?**

PTM (pembelajaran tatap muka) penting untuk dilakukan.

**Alasannya apa?**

Karena selama setahun, banyak dampak negatif PJJ (pembelajaran jarak jauh). Antara lain, *learning loss*, ancaman putus sekolah, dan tekanan psikologis. Terlepas dari berbagai kelonggaran yang diberikan Pemerintah Pusat, hingga saat ini mayoritas sekolah masih menyelenggarakan PJJ.

**Apakah persiapan pemerintah sudah cukup untuk melaksanakan PTM?**

Vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, menjadi prioritas negara dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka. Sasaran vaksinasi mencakup pendidik, misalnya guru, dosen, dan lain-lain seperti tenaga kependidikan, misalnya operator sekolah, *cleaning service*, pegawai tata usaha

dan lain-lain.

**Vaksinasi itu untuk semua jenjang pendidikan, dan untuk negeri maupun swasta kan...**

Vaksinasi diberikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dari seluruh jenjang di satuan pendidikan negeri dan swasta. Formal maupun nonformal, termasuk pendidikan keagamaan.

**Siapa yang mendapatkan prioritas di bidang pendidikan?**

Prioritas ini berdasarkan tingkat kesulitan pembelajaran jarak jauh, dengan tahapan. Tahap pertama, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SLB dan sederajat.

Tahap kedua, pendidik dan tenaga kependidikan SMP, SMA, SMK dan sederajat. Tahap ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

**Berapa banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang akan divaksin?**

Totalnya itu mencapai 5.582.875 pendidik dan tenaga kependidikan.

**Kapan target vaksinasi di bidang pendidikan ini selesai?**

Target penyelesaian vaksinasi, yakni akhir Juni 2021.

**Kalau target itu sudah tercapai, apakah sekolah wajib PTM?**

Setelah guru dan tenaga pendidik divaksin, sekolah wajib menyelenggarakan opsi PTM. Namun, sekolah memberikan kelonggaran bagi orangtua yang masih ingin anaknya PJJ,



**Epidemiolog UI Pandu Riono menilai, risiko penyebaran Virus Corona masih besar. Belum waktunya PTM. Bagaimana itu?**

Dari pusat, kita menerapkan standar yang wajib dipenuhi. Yaitu, daftar periksa. List daftar periksa yang harus disiapkan sekolah, dapat dilihat di *website* Kemendikbud. Kalau tidak terpenuhi, tidak boleh menyelenggarakan PTM. Ke depan, dengan adanya vaksin, diharapkan tingkat risiko jauh menurun dan mayoritas sekolah bisa menyelenggarakan PTM dengan lebih aman.

**Pengawasannya bagaimana?**

Pemerintah Daerah harus bantu memetakan, mana sekolah yang siap dan mana yang tidak. Untuk yang tidak, diharapkan ada bantuan seperti fasilitas sanitasi, penyediaan masker, hand sanitizer, dan lain-lain. ■ NNM